

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Teori yang Relevan dengan Penelitian**

##### **2.1.1 Tinjauan tentang Respon**

###### **2.1.1.1 Pengertian Respon**

Rakhmat J (2009:51), menyatakan bahwa “Respon secara umum merujuk pada tanggapan yang diinterpretasikan sebagai kesan atau hasil yang diperoleh dari pengamatan mengenai subjek, peristiwa, atau hubungan-hubungan tertentu. Hal ini melibatkan proses menyimpulkan dan menafsirkan pesan-pesan dan informasi yang diperoleh”. Respon dapat dipahami sebagai tanggapan atau reaksi seseorang terhadap suatu objek, kejadian, atau situasi yang diamati. Respon ini terbentuk berdasarkan bagaimana seseorang memahami dan menafsirkan informasi yang diterimanya. Dalam prosesnya, individu tidak hanya menerima suatu stimulus secara pasif, tetapi juga melakukan analisis dan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman serta perspektif pribadinya.

Wirawan (2008:87), mengemukakan bahwa “Respon (balas) adalah proses pengorganisasian rangsang. Rangsang proksimal diorganisasikan sedemikian rupa sehingga terjadi representasi fenomenal dari rangsang proksimal itu, proses inilah yang disebut respon”. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Respon adalah suatu kegiatan komunikasi yang hasilnya mempunyai efek berupa dari komunikasi itu sendiri, seorang komunikator melakukan kegiatan komunikasi dengan menjalin sebuah relasi dengan baik sehingga mendapatkan hasil dari komunikasi tersebut yang berupa efek respon.

### 2.1.1.2 Faktor Terbentuknya Respon

Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik darinya. Dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri.

Dengan kata lain, stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung pada 2 faktor, (Bimo Walgito, 2024:55) dalam Pengantar Psikologi

Umum Menyatakan Bahwa:

1. Faktor Internal

Yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipegaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan (*feeling*), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan sebagainya.

2. Faktor Eksternal

Yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bimo walgito dalam bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera.

Berdasarkan penjelasan di atas, yaitu faktor terbentuk nya respon melalui stimulus yang akan mendapatkan pemilihan dan individu ada 2 diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Hal ini dapat berpengaruh terhadap respon dari kedua

faktor tersebut dari faktor internal yaitu di dalam diri manusia ada unsur rohani dan jasmani. Apabila di kedua unsur tersebut salah satunya terganggu maka akan mendapatkan hasil tanggapan yang berbeda. Dan faktor eksternal faktor yang ada di lingkungan lebih mendapatkan respon terhadap objek yang dilihat dan mendapatkan tanggapan dari hasil objek yang dilihat.

### **2.1.1.3 Aspek Respon**

Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau dalam setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap pesan yang dilancarkan oleh komunikator.

Menurut Steven M. Chaffee, sebagaimana dikutip dalam buku Psikologi Komunikasi karya Jalaluddin Rakhmat (2009:218), aspek respon mencakup beberapa elemen utama, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Kognitif  
Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.
2. Aspek Afektif  
Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu.
3. Aspek *Behavioral*  
*Behavioral*, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata meliputi tindakan atau kebiasaan.

Respon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH terhadap Graduasi Mandiri dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan *behavioral*. Aspek kognitif mencerminkan sejauh mana KPM memahami informasi mengenai tujuan, manfaat, serta proses dari graduasi. Pemahaman yang baik akan membantu KPM merasa lebih siap untuk mandiri dan keluar dari bantuan. Aspek afektif mencakup

sikap, keyakinan, dan perasaan mereka terhadap program seperti rasa takut kehilangan bantuan atau justru semangat untuk mandiri. Sedangkan aspek *behavioral* berkaitan dengan kesiapan tindakan nyata, seperti usaha mencari pekerjaan tepat, mengikuti pelatihan keterampilan, atau membangun usaha kecil. Ketiga aspek ini sangat penting untuk diperhatikan oleh pekerja sosial dan pendamping PKH, karena mereka memiliki tugas tidak hanya mengawasi penyaluran bantuan, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir, membangun kepercayaan diri, dan mendampingi langkah konkret KPM menuju kemandirian. Dengan memahami ketiga aspek ini, pendamping bisa menyusun strategi yang lebih tepat dalam proses pemberdayaan dan mendorong keberhasilan graduasi mandiri secara menyeluruh.

## **2.1.2 Tinjauan tentang Kemiskinan**

### **2.1.2.1 Pengertian Kemiskinan**

Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau disebut juga batas kemiskinan (*poverty threshold*). Sejalan dengan definisi tersebut Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, seperti makanan, air bersih, perumahan yang layak. kemiskinan ini terjadi karena adanya keterbatasan manusia dalam hal memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu hak individu atau kelompok mencakup kebutuhan akan makanan,

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, akses terhadap air bersih, tanah, sumber daya alam, lingkungan yang sehat, rasa aman dari kekerasan atau ancaman, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Menurut Edi Suharto (2016) kemiskinan pada dasarnya merujuk pada keadaan di mana seseorang mengalami ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, baik karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya maupun karena kurangnya perlindungan sosial dari negara atau masyarakat terhadap warganya.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana terjadinya kesulitan dalam memenuhi standar hidup yang ditunjukkan salah satunya melalui kebutuhan dasar yang layak serta tidak mempunya mengakses sumber-sumber yang ada sehingga menimbulkan permasalahan.

#### **2.1.2.2 Jenis Kemiskinan**

Edi Suharto (2016:149) dalam buku *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*", mengemukakan bahwa jenis kemiskinan yang umumnya terjadi di masyarakat yaitu sebagai berikut :

##### **1. Kemiskinan absolut**

Kemiskinan Absolut terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan minimum.

##### **2. Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan Relatif terjadi ketika seseorang memiliki akses dan pendapatan

yang lebih rendah dibandingkan standar hidup masyarakat di sekitarnya. Individu dalam kategori ini mungkin sudah memenuhi kebutuhan dasar, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam akses ekonomi dan sosial.

### 3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan Struktural disebabkan oleh ketimpangan dalam sistem sosial dan ekonomi yang menghambat individu atau kelompok tertentu untuk keluar dari kemiskinan. Faktor seperti minimnya kesempatan kerja, akses pendidikan yang terbatas, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya menjadi penyebab utama kemiskinan struktural.

### 4. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan Kultural muncul karena pola pikir, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang membuat seseorang atau kelompok tetap terjebak dalam kondisi miskin. Misalnya, sikap pasrah terhadap nasib, ketergantungan pada bantuan sosial, serta kurangnya motivasi untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas.

#### **2.1.2.3 Faktor Penyebab**

Suwadi, (2014:25) Mengemukakan bahwa Kemiskinan di sebabkan oleh dua hal antara lain yang pertama Kemiskinan di sebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku masyarakat atau seseorang yaitu :

1. Keterbatasan sumber daya modal keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dapat di artikan kualitas sumber daya manusia misalkan keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan.
2. Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk di jangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju.

Menurut pendapat di atas penyebab kemiskinan bisa dari faktor keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar dan lokasi tempat tinggal masyarakat berada di daerah terpencil sulit untuk di jangkau sehingga ini mengakibatkan sulitnya berinteraksi dengan penduduk yang maju.

#### **2.1.2.4 Indikator Penyebab Kemiskinan**

Menurut Sayogyo (dalam Suwadi 2014:27) menjelaskan tentang teori dari lincolin arsyad kemiskinan dapat di lihat atau di ukur dari :

1. Indikator Tingkat Konsumsi Beras mengukur berapa banyak tingkat konsumsi beras per kapita per tahun, dengan rincian ada tiga kategori miskin yaitu sangat miskin, miskin dan nyaris miskin.
2. Indikator Tingkat Pendapatan Dalam pengukuran pendapatan di lihat dari pendapatan perkapita. Dan dapat di lihat dari Garis kemiskinan, Jumlah penduduk miskin di ukur dari pengeluaran per hari satu dollar Amerika. Kalau ukuranya dua dolar per hari maka termasuk miskin.

Menurut penjelasan di atas, indikator penyebab kemiskinan dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu tingkat konsumsi beras dan tingkat pendapatan masyarakat. Konsumsi beras menggambarkan jumlah beras yang dikonsumsi per kapita dalam satu tahun. Semakin rendah tingkat konsumsi beras, maka semakin rendah pula kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok, sehingga mereka masuk dalam kategori sangat miskin, miskin, maupun nyaris miskin. Di sisi lain, tingkat pendapatan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan dapat dibandingkan dengan rata-rata yang berlaku, apakah berada di atas rata-rata atau

justru di bawahnya. Kedua indikator ini saling berkaitan karena konsumsi pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, yang bersumber dari pendapatan. Dengan demikian, tingkat konsumsi beras dan pendapatan tidak hanya menjadi ukuran kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kemampuan dasar masyarakat dalam bertahan hidup, menjaga ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas hidup mereka..

### **2.1.3 Tinjauan tentang Program Keluarga Harapan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Program Keluarga Harapan**

Program keluarga harapan (PKH) merupakan perlindungan sosial yang berbentuk bantuan sosial bersyarat berbasis rumah tangga miskin. Kebijakan PKH dicetuskan antara lain karena adanya krisis global, di mana kondisi ekonomi menurun, sulit mendapatkan kebutuhan pokok terutama dialami oleh masyarakat miskin dan rentan, sehingga dikhawatirkan jumlah masyarakat miskin meningkat. Di luar negeri, PKH dikenal dengan istilah *conditional cash transfer* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat.

Dalam usia pelaksanaan 4 tahun PKH secara bertahap diarahkan menjadi program nasional, PKH baru mencapai 13 provinsi, pengelolahaannya disinergikan melalui beberapa instansi terkait, terdiri dari Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kemenetrian Agama, Kementerian Informasi, BPS, dan Pemerintah Daerah, dilakukan di pusat maupun di daerah. PKH menjadi salah satu bagian dari program prioritas pembangunan, diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan dasar, mengupayakan peningkatan umur harapan hidup penduduk, membaiknya sarana dan prasarana

kesehatan dan pendidikan, serta membaiknya tingkat ekonomi masyarakat miskin, menjadi sangat strategis untuk diimplementasikan secara nasional.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. (Buku Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021, hal.1)

Menurut penjelasan di atas, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Bantuan ini hanya diberikan jika keluarga memenuhi syarat tertentu, seperti menyekolahkan anak dan memanfaatkan layanan kesehatan. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

### **2.1.3.2 Tujuan Program Keluarga Harapan**

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan hasil yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan bantuan bersifat sementara, tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM) secara berkelanjutan. Adapun tujuan-tujuan dari Program Keluarga Harapan yaitu:

#### **1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dari program keluarga harapan ini yaitu untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, serta lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relative kurang peningkatan kesejahteraan.

## 2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan dari program keluarga harapan Secara khusus terdiri atas:

- 1) Meningkatkan status social ekonomi.
- 2) Meningkatkan status kesehatan dan gizi, ibu hamil, ibu nifas anak balita usia 27 tahun yang masuk sekoalah dasar.
- 3) Meningkatkan kualitas akses pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya anak-anak.
- 4) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak

### **2.1.3.3 Manfaat Program Keluarga Harapan**

1. menciptakan perubahan perilaku pada keluarga sangat miskin, agar memberikan perhatian lebih pada pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka.
2. Secara jangka pendek memberikan efek pendapatan dengan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin.
3. ada jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan kualitas kesehatan, nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak keluarga sangat miskin.
4. Mengurangi pekerja anak.
5. Mempercepat pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan ibu hamil, pengurangan angka kematian balita, dan meningkatkan kesetaraan gender.

### **2.1.3.4 Kriteria Keluarga penerima manfaat PKH**

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI No.1 Tahun 2018 Terntang PKH dalam Pasal 5 dijelaskan mengenai kriteria komponen KPM Banturan PKH, yang terbagi

ke dalam tiga kriteria, yaitu:

1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- 1) Ibu hamil/menyusui; dan
- 2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;

2. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- 1) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
- 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
- 3) Anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat; dan
- 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Selain itu, dalam Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH Tahun 2015 menjelaskan terkait penerima bantuan PKH yaitu penerima bantuan PKH adalah keluarga sangat miskin (KSM) peserta PKH yang memiliki satu atau beberapa komponen PKH, yaitu:

1. ibu hamil/ibu nifas/anak balita;
2. Anak berusia kurang dari 7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra-sekolah);
3. Anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib; belajar 12 tahun

#### 4. Anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan secara khusus kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai syarat mutlak untuk berpartisipasi dalam program. Persyaratan ini mencakup kepemilikan komponen tertentu seperti ibu hamil, anak sekolah, atau anggota keluarga dengan disabilitas. Oleh karena itu, meskipun ada keluarga atau individu yang tergolong miskin dan rentan, jika mereka tidak memenuhi kriteria tersebut, maka mereka tidak dapat menjadi penerima manfaat dari PKH. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaan program dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

#### **2.2.3.5 Syarat-Syarat Keluarga penerima manfaat PKH**

Syarat Syarat dalam penerima keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang di maksud dalama pedoman PKH tahun 2021:

1. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) ditandai dengan memiliki kartu identitas (KTP).
2. Terdaftar sebagai golongan keluarga berkeberutuhan pada data kelurahan/desa setempat.
3. Bukan salah satu anggota ASN, TNI, dan POLRI.
4. Belum pernah menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT Subsidi Gaji, dan Kartu Prakerja.
5. Telah terdaftar di DTKS Kemensos RI.

### **2.2.3.6 Hak dan Kewajiban Keluarga penerima manfaat PKH**

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 Pasal 6 menyebutkan bahwa KPM PKH berhak mendapatkan:

1. Bantuan Sosial PKH;
2. Pendampingan PKH;
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
4. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Sementara itu, dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018, KPM PKH berkewajiban untuk:

1. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, minimal 2 kali dalam setahun;
2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun selama 1 bulan; dan
3. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat
4. Menghadiri pertemuan kelompok atau P2K2.

Dari penjabaran hak dan kewajiban KPM PKH di atas dapat disimpulkan bahwa PKH adalah program bantuan yang diberikan dengan syarat kepada keluarga penerima manfaat, yang memiliki hak dan tanggung jawab di dalamnya. Keluarga

penerima manfaat PKH diwajibkan untuk memenuhi kewajiban tertentu agar tetap dapat mempertahankan keanggotaannya dalam program ini, dan jika tidak, mereka akan dikenakan sanksi. Ketika keluarga penerima manfaat tidak mendapatkan hak yang seharusnya, pendamping PKH memiliki tugas untuk mengadvokasi mereka.

### 2.2.3.7 Besaran Bantuan PKH

Bantuan Bantuan PKH untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar di Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) turun setiap tahunnya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin secara bertahap. Penurunan bantuan ini juga bertujuan agar KPM tidak terus bergantung pada bantuan sosial dan terdorong untuk meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga. Berikut rincian dana yang akan diberikan sesuai kategorinya, dijabarkan pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Skema Bantuan PKH

No.	Kategori	Indeks/Tahun (Rp.)	Indeks/3 Bulan (Rp.)
1.	Ibur Hamil	3.000.000	750.000
2.	Anak Usia 0 s.d 6 tahun	3.000.000	750.000
3.	Anak Sekolah SD	900.000	225.000
4.	Anak Sekolah SLTP	1.500.000	375.000
5.	Anak Sekolah SLTA	2.000.000	500.000
6.	Disabilitas Berat	2.400.000	600.000
7.	Lanjut Usia 60 tahun ke atas	2.400.000	600.000

Sumber: Pedoman PKH Tahun 2021

### 2.1.3.8 Peran Pendamping Keluarga Harapan

#### 1. Pengertian Pendamping Program Keluarga Harapan

Pendamping adalah pelaksana PKH di tingkat Kecamatan, dan fungsi utama dari pendamping ialah mendampingi langsung penerima manfaat PKH. Seorang pendamping dibutuhkan perannya karena kebanyakan KPM PKH tidak memiliki

kekuatan apapun baik itu suara atau kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sesungguhnya, untuk itulah mereka membutuhkan pendamping yang bisa mewakili mereka untuk memndapatkan hak-hak mereka.

Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disertai kegiatan pendampingan. Pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa pendamping adalah suatu kegiatan atau startegi pemerintah untuk mendorong keluarga miskin secara optimal, sehingga mampu berupaya untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi keluarga miskin. Maka dari itu perlu adanya pendamping agar dapat mementukan keberhasilan dalam suatu program.

## 2. Peran Pendamping Program Keluarga Harapan

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan yaitu seorang yang mempunyai peran fasilitator dalam memberikan semangat, motivasi atau dorongan kepada mayarakat. Peran ini sebagai fasilitator dapat membantu masyarakat yang didampinginya untuk memenuhi kewajiban di kegiatan sosial yang diikuti. Pendamping didefinisikan sebagai berikut, Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007, hal.4)

Menurut penjelasan diatas, yaitu pendampingan melalui proses kemudahan fasilitas yang diberikan pendamping kepada klien yang menjadi target untuk diberi bantuan untuk mengidentidikasi kebutuhan dan penyelesaian permasalahan dan mendorong tumbuhnya rasa inisiatif dalam pengambilan keputusan sehingga klien bisa menjadi mandiri. pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga nonprofit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

Pendampingan sebagai strategi yang di gunakan oleh pemerintah dan lembaga untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga hal ini dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai permasalahan yang dialami dan berusaha untuk mencari pemecahan masalah yang di hadapi.

#### **2.1.4 Tinjauan tentang Graduasi**

##### **2.1.4.1 Pengertian Graduasi**

Graduasi dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) adalah proses di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) keluar dari kepesertaan program bantuan sosial karena tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat, atau karena telah mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Proses ini menjadi bagian penting dalam menjaga ketepatan sasaran program, agar bantuan sosial benar-benar diberikan kepada keluarga yang masih membutuhkan. Selain itu, graduasi juga bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan sosial bagi para penerima manfaat, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih sejahtera

tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah.

Menurut Petunjuk Teknis Graduasi KPM PKH Tahun 2021, graduasi terjadi ketika kondisi sosial dan ekonomi suatu keluarga mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini harus dibuktikan melalui proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh pendamping sosial untuk memastikan bahwa keluarga tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, graduasi bukan sekadar penghentian bantuan sosial semata, tetapi merupakan bagian penting dari upaya pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Program ini dirancang agar keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mencapai kemandirian secara ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara berkelanjutan tanpa lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah.

#### **2.1.4.2 Tujuan Graduasi**

Graduasi dalam PKH memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Mendukung percepatan pengentasan kemiskinan Graduasi dirancang untuk memastikan bahwa keluarga yang telah memperoleh manfaat dari PKH dapat keluar dari kondisi kemiskinan dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
2. Menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan sosial Dengan adanya mekanisme graduasi, pemerintah dapat memastikan bahwa hanya keluarga yang masih memenuhi kriteria miskin yang terus menerima bantuan sosial.
3. Mengurangi kesenjangan sosial Graduasi mencegah ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial, sehingga keluarga yang sudah mampu dapat keluar dari program dan memberikan kesempatan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.

4. Mewujudkan rasa keadilan sosial Dengan mengeluarkan keluarga yang telah sejahtera dari daftar penerima bantuan, PKH dapat lebih berfokus pada mereka yang benar-benar membutuhkan.

#### **2.1.4.3 Jenis Graduasi**

Berdasarkan Petunjuk Teknis Graduasi KPM PKH Tahun 2020, terdapat dua jenis graduasi dalam PKH, yaitu:

##### **1. Graduasi Alamiah**

Graduasi alamiah terjadi ketika keluarga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima PKH karena kondisi tertentu. Ini bisa terjadi karena perubahan dalam struktur keluarga atau kehilangan komponen kepesertaan. Contoh kasus dalam graduasi alamiah meliputi:

- 1) Tidak memiliki pengurus kepesertaan, misalnya kepala keluarga meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang berhak menerima bantuan.
- 2) Tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan, seperti kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial. Misalnya, jika anak dalam keluarga sudah lulus sekolah atau tidak ada anggota keluarga yang masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan PKH.

##### **2. Graduasi Sejahtera Mandiri**

merupakan kondisi ketika keluarga secara sadar memilih untuk berhenti menerima bantuan PKH karena telah merasa mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sosial. Proses ini dapat berlangsung atas dasar kesadaran sendiri maupun melalui arahan dari pendamping sosial atau instansi terkait. Graduasi mandiri menunjukkan adanya peningkatan kapasitas keluarga dalam

mengelola kehidupannya tanpa ketergantungan pada bantuan. Keputusan ini biasanya didukung oleh keberhasilan usaha, peningkatan pendapatan, atau dukungan dari lingkungan sekitar. Beberapa ontok kasus graduasi mandiri meliputi:

- 1) Keluarga merasa mampu dan menolak bantuan PKH karena ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.
- 2) Keluarga mengalami peningkatan ekonomi, misalnya mendapat pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, memiliki usaha yang sukses, atau memperoleh harta kekayaan tertentu.
- 3) Salah satu anggota keluarga menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, atau pejabat pemerintahan, sehingga tidak lagi tergolong sebagai keluarga miskin.

#### **2.1.4.2 Proses Graduasi dalam PKH**

Proses graduasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan melalui sejumlah tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pendamping sosial, pemerintah daerah, serta Kementerian Sosial. Kolaborasi antar pihak ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan kemandirian KPM setelah keluar dari program bantuan. Berikut ini merupakan langkah-langkah utama dalam proses graduasi tersebut.

1. Pemutakhiran Data Pendamping sosial melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk mengevaluasi kondisi sosial ekonomi KPM PKH. Pemutakhiran data ini dilakukan melalui aplikasi e-PKH atau SIKS-NG.
2. Identifikasi KPM yang Berpotensi untuk Graduasi Pendamping sosial akan melakukan penilaian terhadap KPM yang berpotensi untuk lulus dari PKH, baik

melalui data yang tersedia maupun melalui kunjungan lapangan (*home visit*).

3. Sosialisasi dan Edukasi kepada KPM yang masuk dalam kategori graduasi akan mendapatkan sosialisasi mengenai manfaat dan konsekuensi dari proses graduasi. Pendamping sosial juga memberikan motivasi dan edukasi agar KPM siap untuk mandiri tanpa bantuan PKH.
4. Penetapan KPM yang Lulus dari PKH Setelah melalui proses evaluasi dan verifikasi, KPM yang dianggap layak untuk lulus dari PKH akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.
5. Tindak Lanjut Pasca Graduasi KPM yang telah lulus dari PKH diarahkan untuk mendapatkan akses ke program pemberdayaan ekonomi lainnya, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau program sosial lainnya yang dapat membantu mereka mempertahankan kemandirian ekonomi.

## **2.1.5 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan**

### **2.1.5.1 Pengertian Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif dalam mencapai tujuannya (*Zastrow, 2017:4*). Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai suatu metode institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka (*Siporin dalam Sukoco, 2021:11*). Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi

sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan menyelenggarakan secara terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi agar dapat menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif dalam mencapai tujuannya.

#### **2.1.5.2 Fungsi Pekerjaan Sosial**

Fungsi dasar pekerjaan sosial dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas pekerjaan sosial (Siporin dalam Sukoco, 2021:63), sebagai berikut:

1. Mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Fungsi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan tugas pelayanan-pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbaikan dan pemeliharaan penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial, dan aksi sosial.
2. Menjamin memadainya standar subsistensi, kesehatan, dan kesejahteraan bagi semua orang. Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas sebagai berikut:
  - 1) Mengembangkan sumber-sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan bagi perkembangan individu dan keluarga.

- 2) Mendistribusikan dan meratakan alokasi sumber-sumber sosial dan sumber-sumber ekonomi yang mereka butuhkan.
  - 3) Mencegah timbulnya kesengsaraan dan kemiskinan, tekanan-tekanan sosial, dan penyimpangan-penyimpangan.
  - 4) Melindungi individu-individu dan keluarga dari berbagai bahaya/kesulitan kehidupan dan mengkompensasikan mereka agar terhindar dari bencana ketidakmampuan dan kematian.
3. Meningkatkan kemampuan orang melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan mereka di dalam institusi sosial. Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas sebagai berikut:
- 1) Mengaktualisasikan potensi-potensi mereka untuk menjadi produktif dan dapat merealisasikan diri sebagai bagian dari orang lain maupun lingkungan sosialnya, sehingga mampu berkreasi dan mempunyai altruistik bagi keberfungsian sosial dan kehidupan bersama.
  - 2) Membantu orang mencapai tingkat kehidupan normatif yang tinggi dan membantu untuk mendapatkan kepuasan dalam melaksanakan fungsionalitas sosial sebagai anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan, memanfaatkan sumber dan pelayanan pelayanan serta melalui pemecahan kesulitan-kesulitan berelasi di dalam kehidupan sosial.
  - 3) Melayani sebagai wakil (*surrogate*) keluarga dan komunitas dalam memberikan dorongan substitusi, perlindungan, dan pencegahan kepada individu-individu dan keluarga-keluarga.

- 4) Mengintegrasikan orang dengan orang lain, menjembatani di antara mereka dan mempertemukan individu-individu dengan lingkungan sosial mereka, khususnya dengan sistem sumber kesejahteraan sosial.
4. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial (*social order*) serta struktur institusional masyarakat.

Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu institusi-institusi sosial mengembangkan dan melaksanakan struktur serta program-program pelayanan secara efektif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan anggota.
- 2) Mengimplementasikan secara efektif ukuran-ukuran perubahan dan adaptasi sosial, stabilitas, dan kontrol sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
- 3) Mencegah dan memecahkan konflik-konflik serta permasalahan sosial hingga tingkat tinggi.
- 4) Memanajemen serta mengoreksi tingkah laku yang menyimpang dan disorganisasi sosial agar dapat terjadi inovasi dan perubahan yang konstruktif.

### **2.1.5.3 Prinsip Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial memiliki beberapa prinsip ketika melakukan praktik pertolongan dan berinteraksi dengan kliennya harus didasarkan kepada prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh literatur pekerjaan sosial (Sukoco, 2021:119), sebagai berikut:

1. Individualisasi (*individualization*).
2. Mengekspresikan perasaan yang bertujuan atau disengaja (*purposeful expression of feeling*).

3. Keterlibatan emosional yang terkontrol (*controlled emotional involvement*).
4. Penerimaan (*acceptance*).
5. Sikap tidak menghakimi (*nonjudgmental attitude*).
6. Penentuan nasibnya sendiri (*self determination*).
7. Kerahasiaan (*confidentiality*).

#### **2.1.5.4 Peranan Pekerjaan Sosial**

Peranan pekerjaan sosial yang dipilih idealnya disesuaikan dengan keadaan serta dipilih yang paling efektif. Adapun peranan-peranan pekerjaan sosial (Zastrow, 2017:67), sebagai berikut:

##### **1. *Enabler***

Pekerja sosial berperan sebagai *enabler* yaitu membantu individu atau kelompok untuk mengartikulasikan kebutuhan, mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi strategi resolusi, dan mengembangkan kapasitas klien untuk menangani permasalahan secara efektif.

##### **2. *Broker***

Pekerja sosial berperan sebagai penghubung antara individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan pada komunitas layanan.

##### **3. *Advokator***

Pekerja sosial mengadvokasi klien atau kelompok membutuhkan bantuan, dengan menyediakan kepemimpinan untuk mengumpulkan informasi, memperdebatkan kebenaran kebutuhan klien, dan menantang keputusan lembaga yang tidak menyediakan layanan.

#### 4. *Aktivis*

Pekerja sosial sebagai aktivis mencari perubahan kelembagaan, dengan tujuan untuk mengubah lingkungan sosial menjadi lebih baik dengan memenuhi kebutuhan individu yang diakui.

#### 5. *Mediator*

Pekerja sosial berperan sebagai mediator dengan melibatkan intervensi dalam perselisihan antar pihak untuk membantu mereka menemukan kompromi, mendamaikan perbedaan, atau mencapai kepuasan bersama perjanjian.

#### 6. *Negosiator*

Pekerja sosial berperan sebagai negosiator dengan menyatukan individu yang berkonflik lebih dari satu serta berusaha untuk berkompromi hingga dapat diterima bersama perjanjian.

#### 7. *Edukator*

Pekerja sosial berperan sebagai pendidik dengan pemberian informasi kepada klien dan mengajarkan keterampilan yang adaptif.

#### 8. *Inisiator*

Pekerja sosial sebagai inisiator harus menarik perhatian pada suatu masalah atau potensi masalah dengan mengenali masalah terlebih dahulu.

#### 9. *Empowerer*

Pekerja sosial berfokus pada pemberdayaan dengan berusaha mengembangkan kapasitas klien untuk memahami lingkungan mereka, membuat pilihan, bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan memengaruhi situasi kehidupan mereka melalui keahlian dan advokasi.

#### 10. Koordinator

Pekerja sosial berperan sebagai koordinator dengan menyatukan beberapa komponen secara terorganisir.

#### 11. *Researcher*

Pekerja sosial berperan sebagai peneliti dengan melakukan riset dalam praktik pekerjaan sosial.

#### 12. *Group Facilitator*

Pekerja sosial berperan sebagai fasilitator kelompok dengan memimpin aktivitas kelompok.

#### 13. *Public speaker*

Pekerja sosial yang memiliki keterampilan berbicara didepan umum dapat menjelaskan layanan pada kelompok klien yang potensial.

### **2.1.5.5 Sistem Dasar Pekerjaan Sosial**

Sistem dasar pekerjaan sosial (Trustisari, 2022:35), sebagai berikut:

#### 1. Sistem pelaksana perubahan (*a change agent system*)

Sistem pelaksana perubahan adalah sekelompok orang yang tugasnya memberikan bantuan atas dasar keahlian yang berbeda beda serta bekerja dengan sistem yang memiliki ukuran berbeda

#### 2. Sistem klien (*a client system*)

Sistem klien yang dimaksud yaitu individu, kelompok, organisasi dan masyarakat yang disamping menjadi penerima bantuan, juga merupakan sistem yang meminta bantuan dan terlibat dalam pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial sebagai seorang pelaksana perubahan.

### 3. Sistem sasaran (*a target system*)

Sistem sasaran yaitu orang-orang yang dijadikan sasaran perubahan atau pengaruh dasar agar tujuan tercapai.

#### **2.4.6 Sistem Sumber Pekerjaan Sosial**

Sistem sumber pekerjaan sosial diklasifikasikan kedalam tiga golongan (Minahan dalam Sukoco, 2021:51), sebagai berikut:

##### 1. Sistem sumber informal atau alamiah (*informal or natural resource systems*).

Sistem sumber informal atau alamiah berupa keluarga, teman, tetangga, maupun orang-orang lain yang bersedia membantu. Bantuan yang dapat digali dan dimanfaatkan dari sumber-sumber alamiah tersebut adalah dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi, dan pelayanan-pelayanan kongkrit lainnya.

##### 2. Sistem sumber formal (*formal resource systems*).

Sistem sumber formal adalah keanggotaannya di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal dengan memiliki tujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sistem sumber tersebut juga dapat membantu anggotanya untuk bernegosiasi serta memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan.

##### 3. Sistem sumber kemasyarakatan (*societal resource system*).

Sistem sumber kemasyarakatan berupa rumah sakit, badan-badan sosial, badan-badan adopsi, program-program latihan kerja, pelayanan pelayanan resmi, dan lain-lain. Orang didalam kehidupannya terkait dengan sistem sumber kemasyarakatan dapat berupa sekolah, pusat-pusat perawatan anak, penempatan-penempatan tenaga kerja, program-program tenaga kerja, dan sebagainya. Orang terkait pada badan-badan pemerintah dan pelayanan-pelayanan umum lainnya

seperti: kepolisian, tempat-tempat rekreasi, dan pelayanan perumahan.

#### **2.1.5.6 Strategi Pekerjaan sosial**

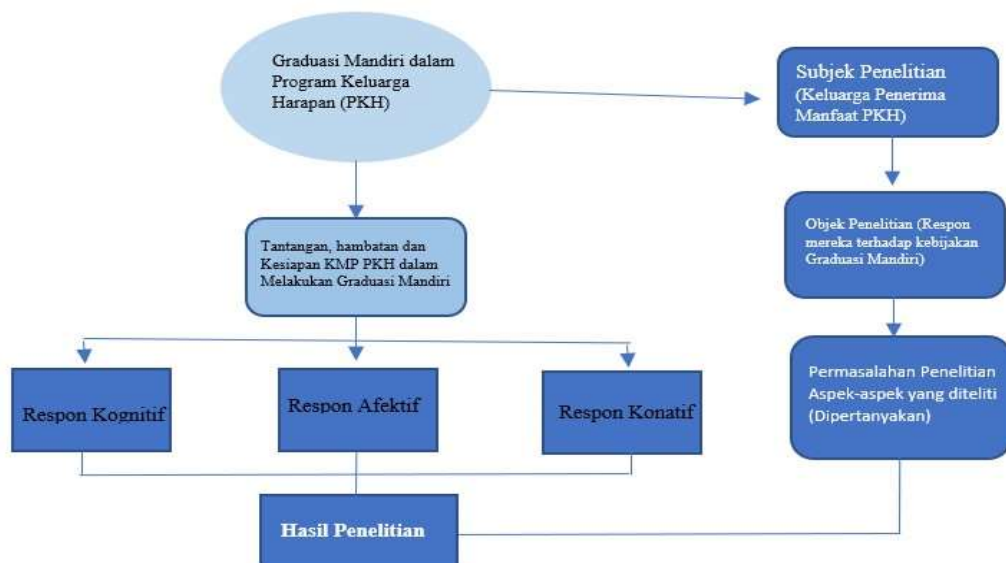
Strategi penanganan kemiskinan oleh pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan “*person-in-environment dan person-in situation*”. Selain itu, motto pekerjaan sosial seperti “*to help people to help themselves*” (menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri), “*self determination*” (penentuan nasib sendiri) dan “*working with people, not working for people*” (bekerja dengan masyarakat bukan bekerja untuk masyarakat) menunjukkan betapa pekerjaan sosial memiliki komitmen yang kuat terhadap Dalam faktor pembentuk kemiskinan yaitu mental dan *mindset*, selain tentu juga oleh struktur sosial di masyarakat, beberapa strategi yang bisa menjadi alternatif pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Mengubah perspektif dalam memandang orang miskin dari *Problems Perspective* ke *Strengths-Perspective*. *Problems Perspective* berfokus pada masalahmasalah atau kekurangan dan kebutuhan penyandang masalah. Sedangkan, *Strengths-Perspective* melihat bahwa orang miskin memiliki sumber daya dan kapasitas untuk mengembangkan kehidupan mereka.
2. Pemerintah memiliki berbagai kebijakan dan program dalam mengatasi kemiskinan. Contohnya, Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia

Sehat (PIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Dana Desa, dan sebagainya. Beberapa program tersebut telah dilengkapi dengan organisasi atau perangkat pendamping terutama saat penyalurannya ke masyarakat. Pemerintah harus memaksimalkan peran para pendamping tersebut agar dapat membantu masyarakat mengikis budaya miskin yang masih ada.

3. Pemerintah perlu menumbuhkan *selfefficacy*, *self-reliance* dan kemandirian melalui program *empowerment*, dalam diri masyarakat miskin (Markum, 2009). Berbagai program pemerintah di atas harus dilihat dengan cara berpikir yang baru yang memunculkan mindset untuk berupaya keluar dari situasi kemiskinan. Program-program tersebut harus dipahami sebagai stimulan untuk selanjutnya berusaha keras menjadi lebih sejahtera sehingga tidak ada lagi mental “ketergantungan” terhadap program program tersebut.

## 2.2 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian tentang Faktor Penghambat Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan hubungan sistematis antara berbagai elemen dalam penelitian yang berfokus pada respon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Graduasi Mandiri. Gambar bagan yang digunakan menjelaskan bahwa penelitian ini berpusat pada subjek KPM PKH, yang merespons kebijakan graduasi mandiri sebagai objek penelitian. Respon KPM PKH dikategorikan ke dalam tiga aspek utama: (1) Respon Kognitif, yang mencerminkan tingkat pemahaman KPM terhadap konsep, tujuan, dan manfaat Graduasi Mandiri; (2) Respon Afektif, yang menggambarkan sikap emosional, perasaan, dan penerimaan KPM terhadap program ini, baik dalam bentuk dukungan maupun resistensi; dan (3) Respon Konatif, yang berkaitan dengan tindakan konkret yang dilakukan KPM sebagai dampak dari pemahaman dan perasaan mereka terhadap program, seperti kesiapan untuk mandiri atau sebaliknya, ketergantungan yang masih tinggi. Keseluruhan rangkaian respon ini dianalisis untuk menghasilkan temuan penelitian yang memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas dan dampak Graduasi Mandiri terhadap KPM PKH, baik dari segi perubahan pola pikir, sikap, maupun tindakan mereka dalam menghadapi kebijakan tersebut.